

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Fenomena perang Irak yang diprakarsai Amerika Serikat dan diikuti para sekutunya yang berjumlah sekitar 30 negara mengalami babak baru, situasi keamanan yang semakin memburuk di Irak dan perubahan perkembangan politik dalam negeri negara-negara anggota koalisi menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat tersebut. Beberapa bulan setelah pengiriman pasukan koalisi ke Irak, Spanyol menarik 1300 pasukannya dari Irak, sebagai janji Perdana Menteri baru Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero yang akan menarik pasukannya dari Irak apabila dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Maret 2004 mengalahkan Perdana Menteri Jose Maria Aznar. Kekalahan Perdana Menteri Jose Maria Aznar tersebut disebabkan mendukung Amerika Serikat dalam perang terhadap Irak, sehingga Spanyol menjadi sasaran serangan teroris di kereta api bawah tanah, tiga hari sebelum pemilihan umum yang menyebabkan tewasnya sekitar 200 jiwa.¹

Pemerintah Honduras mengikuti jejak Spanyol untuk menarik pasukannya lebih awal dari jadwal semula. Presiden Honduras Ricardo Maduro menyatakan akan menarik pasukannya sesegera mungkin. Hal tersebut disebabkan situasi keamanan yang memburuk di Irak. Setelah tumbangny Pemerintah Saddam

... ..

pasukan koalisi dari Irak. Pada tanggal 17 Juni 2004 seorang warga Korea Selatan Kim Sun-il (33) disandera oleh kelompok militan di Irak. Penyandera menuntut Pemerintah Korea Selatan menarik 660 tentaranya dari Irak dan tidak mengirimkan pasukan tambahan sekitar 3000 personel ke Irak.² Namun, Pemerintah Presiden Roh Moohyun menolak tuntutan penyandera dan mengupayakan jalur diplomatik untuk membebaskan Kim Sun-il. Dan akhirnya pada tanggal 22 Juni 2004 mayat Kim Sun-il ditemukan oleh pasukan Amerika Serikat di barat Baghdad.

Peristiwa-peristiwa penyanderaan seperti warga Korea Selatan juga menimpa warga negara Italia. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga menolak tuntutan penyandera untuk menarik 3000 pasukannya dari Irak, sehingga seorang sandera Fabrizio Quattrocchi dieksekusi penyandera. Hal serupa juga menimpa warga negara Bulgaria yang dieksekusi penyandera, yang disebabkan tuntutan penarikan 480 anggota batalyon infanteri ditolak oleh Pemerintah Presiden Georgi Parvanov dan Perdana Menteri Simeon Saxcoburggotski. Namun nasib baik berpihak kepada sandera asal Jepang, para penculik menuntut penarikan pasukan Jepang atau ketiga sandera akan dibakar hidup-hidup. Tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, tetapi kemudian sandera dibebaskan.

² Kompas, Rabu 22 Juni 2004

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) 11 September 2001 membuat isu terorisme kembali marak, terlebih dengan dikeluarkannya daftar negara-negara yang terlibat dengan jaringan terorisme internasional. Sebanyak empat puluh lima negara diduga keras oleh Amerika Serikat terlibat jaringan terorisme internasional.

Perang melawan terorisme internasional juga mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Komite Pemberantasan Terorisme (Counter Terrorism Committee / CTC) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 (2001). Komite tersebut telah menetapkan setiap negara anggota PBB harus melaporkan pemberantasan terorisme di masing-masing negara anggota PBB.³

Pasca serangan September 2001, Amerika Serikat menganggap Irak merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional yang mengancam kepentingan Amerika Serikat. Dalam pidato kenegaraan Presiden George Walker Bush pada tanggal 29 Agustus 2002, memasukkan Irak bersama Iran dan Korea Utara ke dalam poros kejahatan.⁴

Setelah Afghanistan diserang, sepak terjang Amerika Serikat di mancanegara yang tampaknya didasari filosofi *pre-emptive strike* atau serangan pendahuluan untuk menangkal segala potensi ancaman terhadap kepentingan negara adidaya tersebut telah kian ditampakan oleh Presiden George Bush dengan menyerang

digulingkan. Tujuan Amerika Serikat berhasil diwujudkan yaitu Baghdad jatuh pada tanggal 9 April 2003 ditandai dengan tumbangnya patung Saddam Hussien di Lapangan Firdaus dan bahkan kemudian berhasil menangkap Saddam Hussein di luar kota Ad-Dawr, sekitar 15 kilometer selatan Tikrit pada tanggal 13 Desember 2003 oleh divisi infantri keempat pasukan Amerika Serikat.⁸

Namun, berakhirnya perang yang diumumkan Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tanggal 1 Mei 2003 ternyata belum selesai. Perlawanan dari kelompok-kelompok bersenjata di Irak masih terus berlanjut. Ancaman-ancaman aksi serangan gerilya, bom bunuh diri, penembakan jatuh helikopter, pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan terus menghantui di Irak. Kebencian terhadap pasukan Amerika Serikat dan pasukan asing lainnya yang dianggap sebagai penjajah makin memuncak.

Seluruh kejadian itu membuat Amerika Serikat dan sekutunya menyadari realitas tersebut. Mereka membutuhkan bantuan pasukan internasional di Irak. Oleh karena itu Amerika Serikat meminta negara sekutu-sekutunya untuk tidak menarik pasukannya atau mengirim pasukan tambahan ke Irak. Amerika Serikat juga meminta negara-negara sekutunya yang lain untuk mengirimkan pasukan yang tergabung dalam pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat, diantaranya negara-negara yang tergabung dalam pasukan koalisi itu adalah Jepang, Bulgaria, Korea Selatan, Filipina, Polandia, dan 25 negara lainnya.

Amerika Serikat juga meminta negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berpartisipasi bergabung dengan pasukan koalisi di Irak, namun hanya Thailand dan Filipina yang mengirimkan pasukannya ke Irak. Amerika Serikat

dan ASEAN juga telah menandatangani ASEAN – US Joint Declaration for Cooperation to Combat Internasional Terrorism, di Bandar Seri Begawan pada tanggal 1 Agustus 2002. Kerjasama tersebut untuk mencegah, menangani, memerangi terorisme internasional melalui pertukaran informasi dan intelijen, penetapan kebijakan dalam menumpas terorisme yang sesuai dengan resolusi PBB.⁹

Pemerintah Filipina merupakan salah satu sekutu utama Amerika Serikat dalam memerangi terorisme internasional, terlebih lagi setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan daftar jaringan terorisme internasional yang salah satu negaranya adalah Filipina. Terdapatnya gerakan-gerakan terorisme yang ada di wilayah Filipina yang termasuk dalam jaringan terorisme internasional (MILF, Abu Syyaf, NPA, Brigade Alex Boncayao) membuat Pemerintah Filipina mengambil sikap memerangi terorisme. Amerika Serikat membantu Filipina untuk mengatasi kelompok-kelompok teroris tersebut berupa pemberian bantuan ekonomi dan investasi, latihan militer bersama, pelatihan tentara Filipina, Amerika Serikat juga memasok perlengkapan militer yang canggih dan kerja intelijen.

Dalam sejarahnya Amerika Serikat mempunyai hubungan yang baik dengan Filipina dalam mengusir penjajah Spanyol dan Jepang, Amerika Serikat juga memberikan kemerdekaan kepada Filipina sepanjang Filipina dapat menegakkan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat telah membuat perjanjian dengan Filipina mengenai pangkalan militer Amerika di wilayah Republik Filipina. Persetujuan antara Amerika Serikat dan Filipina

tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 1947, dimana Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah Filipina merupakan wilayah yang cukup strategis bagi keamanan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.¹⁰

Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Filipina menginginkan kerjasama dalam pertahanan bersama kedua negara mereka melalui perjanjian yang sesuai prosedur dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khusus melalui izin kepada Amerika Serikat oleh Filipina, dalam pelaksanaan hak dan kedaulatannya tentang pemakaian tanpa disewa dalam mengembangkan kepentingan bersama kedua negara, mengenai tanah tertentu milik pemerintah. Untuk mengimplementasikan perhatiannya atas kesejahteraan Filipina, maka Amerika Serikat mengirim misi ke Filipina dan memberikan bantuan yang layak kepada Filipina dalam pembangunan pasukan pertahanan Filipina.

Resolusi Bersama Kongres Amerika Serikat tanggal 29 Juni 1944, memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat supaya memperoleh pangkalan-pangkalan untuk perlindungan bersama Filipina dan Amerika Serikat, kemudian Resolusi Bersama No. 4 Kongres Filipina yang disetujui pada tanggal 28 Juli 1945 memberi wewenang kepada Presiden Filipina untuk merundingkan dengan Presiden Amerika Serikat tentang didirikannya pangkalan sesuai dengan Resolusi Bersama Kongres Amerika Serikat, dengan maksud untuk menjamin integritas wilayah Filipina, perlindungan bersama Filipina dan Amerika Serikat, dan pemeliharaan perdamaian Pasifik.

¹⁰ William L. Bradley, Mochtar Lubis, *Dokumen-Dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri AS dan Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 107.

Penarikan Pasukan Filipina yang dipimpin Brigadir Jenderal Jovito Palparan dilakukan secara bertahap, pada mulanya delapan dari 51 anggota pasukannya ditarik pada Rabu 14 Juli dan kemudian pada Senin 19 Juli 2004 Pemerintah Filipina menarik seluruh pasukan terakhir yang masih berada di Irak.

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik suatu permasalahan : Mengapa Pemerintah Filipina (Presiden Gloria Arroyo) menarik pasukannya dari Irak ?

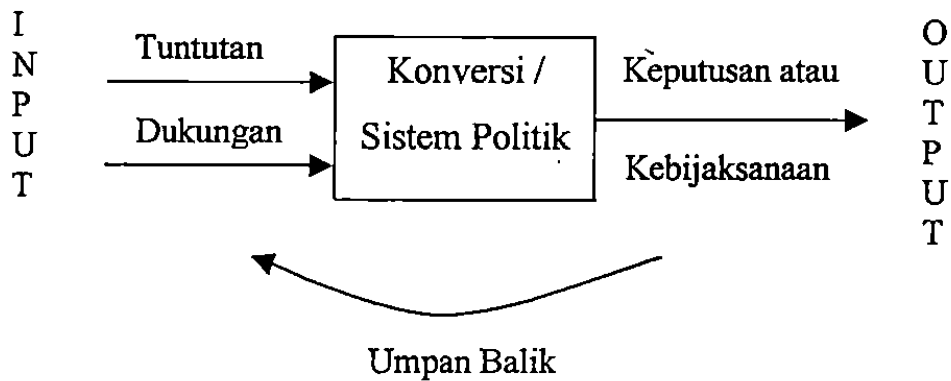
E. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penulis akan menggunakan teori analisa sistem politik dari David Easton. David Easton menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.¹³ Selanjutnya jika kita berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai menjelaskan berbagai hal : input -

¹³ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Prentise-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1965, hal. 57.

sistem atau proses politik - output. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut. Diagram ini merupakan suatu "model" yang sangat sederhana yang bisa dipakai sebagai pendekatan dalam mempelajari kehidupan politik.¹⁴

Lingkungan



Lingkungan

Pada hakekatnya sistem politik merupakan suatu sub sistem dari sistem sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem politik harus dipisahkan dari sistem sosial yang lainnya. Dalam hal seperti ini akan muncul suatu permasalahan, yakni kapankah seseorang atau sekelompok orang masuk atau terlibat di dalam sistem politik? Jawabnya jelas, apabila seseorang atau sekelompok orang telah terlibat atau melibatkan diri di dalam aktivitas politik, yakni aktivitas yang sedikit banyak berhubungan secara langsung dengan pembuat keputusan-keputusan yang

mengikat masyarakat, maka dapat dinyatakan bahwa mereka sudah masuk atau terlibat di dalam sistem politik.

Alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat yaitu mengapa orang melibatkan diri dalam kegiatan politik adalah adanya tuntutan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan memuaskan. Ada satu fakta yang mendominasi kehidupan politik semua masyarakat : yaitu kelangkaan akan sebagian besar hal-hal atau benda-benda yang bernilai tinggi. Beberapa dari tuntutan akan hal-hal yang relatif langka itu tidak pernah masuk ke dalam sistem politik sebelum dipenuhi melalui perundingan-perundingan pribadi dari atau penyelesaian-penyelesaian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bila tuntutan-tuntutan atau kehendak-kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat, maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi input-input bagi sistem politik.

Input yang terdapat dalam sistem politik ini dapat berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri. Input yang masuk ke dalam sistem politik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu input yang berupa tuntutan dan input yang berupa dukungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah merupakan hasil atau konsekuensi dari bekerjanya suatu sistem politik. Output tersebut mempunyai arti yang penting bagi masyarakat dari sistem politik yang bersangkutan. Output tersebut berupa keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang bersifat otoritatif

Input yang merupakan masukan yang berfungsi sebagai bahan bakar atau energi bagi sistem politik, melalui proses interaksi antar aktor-aktor politik dikonversikan menjadi output. Sesudah konversi berlangsung, maka kemudian akan mengakibatkan keluarnya konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang berwujud kebijaksanaan yang harus dipatuhi dan ditaati. Kebijakan-kebijaksanaan yang baru tersebut juga merupakan *feedback* atau umpan balik bagi terbentuknya input yang baru. Hal yang kemudian sebenarnya sudah merupakan suatu kewajaran dalam suatu sistem, dan oleh karenanya dalam sistem politik umpan balik semacam ini dapat terjadi.

Dari pengertian awal sampai perkembangan sistem politik dapat dimengerti bahwa kasus yang terjadi dalam kehidupan politik Filipina, dapat dikatakan bahwa tuntutan-tuntutan domestik yang begitu besar tersebut merupakan input bagi sistem politik Filipina. Tuntutan-tuntutan tersebut meminta Pemerintah Presiden Gloria Macapagal Arroyo untuk menarik pasukannya dari Irak, setelah sebuah kelompok garis keras di Irak yang menamakan dirinya Brigade Khaled Ibn Al Walid pada tanggal 4 Juli 2004 telah menculik dan menyandera seorang warga negara Filipina, Angelo de la Cruz (46) yang bekerja sebagai sopir truk yang membawa minyak mentah untuk sebuah perusahaan Arab Saudi yang beroperasi di Irak dalam perjalanan dari Arab Saudi menuju Irak. Para penculik mengancam akan memenggal kepala Angelo apabila sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu pada hari Minggu 18 Juli 2004 atau paling lambat pada Selasa 20 Juli 2004, Filipina tidak menarik pasukannya dari Irak.

Input yang berupa tuntutan adalah tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi-organisasi di dalam maupun di luar negeri Filipina selama aksi penyanderaan di Irak berlangsung, disampaikan melalui demonstrasi-demonstrasi ataupun konferensi pers tokoh-tokoh dari organisasi atau masyarakat. Angelo de la Cruz merupakan representasi dari seorang warga negara Filipina dengan delapan orang anak yang mengalami kemiskinan di kampung halamannya Buenaevista, 12 km sebelah utara Kota Mexico, Propinsi Pampanga yang ingin mencari peluang untuk mewujudkan harapan mengubah kondisi keluarganya yang menyedihkan dengan bekerja keras sebagai seorang sopir truk di Timur Tengah.

Tuntutan antara lain berasal dari para pekerja Filipina khususnya 1,5 juta yang bekerja di Timur Tengah dan lebih dari 8 juta di seluruh dunia yang membutuhkan kesejahteraan dan perlindungan keselamatan mereka dari pemerintah. Demonstrasi-demonstrasi di dalam negeri dilakukan oleh organisasi-organisasi buruh Filipina dan anggota keluarga pekerja Filipina yang bekerja di luar negeri. Permintaan penarikan pasukan Filipina dari Irak dilakukan juga oleh jutaan pekerja migran diberbagai negara, diantaranya Perkumpulan Migran Internasional Saudi Arabia yang mengirim petisi kepada pemerintah yang ditangani oleh pemimpin 26 organisasi komunitas Filipina dan juga di Amerika Serikat terdapat Koalisi Migran Global, koalisi antara pekerja Filipina dan berbagai ras di sekitar 20 negara, mengadakan musyawarah, rapat umum dan mendoakan keselamatan hidup Angelo de la Cruz.¹⁵

¹⁵ <http://www.gov.ph/news/printerfriendly.asp?newsid=5330>, Down Load 5 Oktober 2004.

dukungannya terhadap pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat, karena telah mengkhawatirkan sekitar 4000 tenaga kontrak Filipina di Irak dan lebih dari 1,5 juta lainnya yang bekerja di Timur Tengah dalam bahaya.

Sedangkan para anggota kongres telah mencatatkan resolusi dewan yang didukung *sistem party lists* Anakpawis, Akbayan, Bayan Muna, dan Gabriela Women's Party (GWP) mendesak Presiden Gloria Macapagal Arroyo sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Filipina mempertimbangkan keputusannya dan tidak menunda penarikan pasukan Filipina dari Irak sesuai jadwal tanggal 20 Agustus 2004.¹⁹

Kekhawatiran juga berasal dari kelompok oposisi Filipina, setelah Presiden Gloria Arroyo berhasil memenangkan pemilihan presiden yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2004, mengalahkan saingan utamanya Fernando Poe Junior. Fernando Poe yang memiliki pendukung cukup besar tidak mengakui kealahannya dan menuduh bahwa dirinya telah dicurangi dalam perhitungan suara. Dalam masa krisis sandera Presiden Arroyo masih harus menghadapi perselisihan di dalam negeri atas kemenangannya dalam pemilu tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok Fernando Poe yang didukung mantan Presiden Joseph Estrada dan mantan Ibu Negara Imelda Marcos yang dikhawatirkan akan mendalangi protes massal yang dapat menjatuhkan pemerintahan bila sandera itu dieksekusi.

Dukungan juga diberikan oleh para Senator diantaranya Presiden Senat Franklin Drilon, Pemimpin Mayoritas Senat Francis Pangilinan, Manuel Villar,

Rodolfo Bianzon, Panfilo Lacson, dan Manuel Roxas yang mendukung sepenuhnya Pemerintahan Arroyo untuk menarik pasukan Filipina dari Irak. Para senator menyesalkan tindakan Presiden Gloria Arroyo yang melakukan kesalahan dengan mengirim pasukan Filipina ke Irak tanpa persetujuan Senat. Dalam Konstitusi Filipina article VII section 21 menyatakan tidak ada perjanjian atau persetujuan internasional akan syah dan efektif kecuali kalau mendapat persetujuan paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat.

Menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut, Pemerintah Presiden Arroyo menjadi bimbang antara desakan rakyatnya untuk membebaskan jiwa Angelo de la Cruz atau mempertahankan komitmen yang diberikan kepada komunitas internasional. Berdasarkan Konstitusi Filipina article II section 4 menyatakan bahwa tugas utama pemerintah adalah mengabdikan dan melindungi rakyat. Sedangkan dalam article II section 18, negara menyatakan tenaga kerja sebagai kekuatan utama dibidang sosial-ekonomi. Negara akan melindungi hak para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.²⁰

Berdasarkan Konstitusi Filipina di atas, Presiden Arroyo memiliki wewenang untuk melindungi rakyatnya, yaitu para pekerja migran Filipina di Irak dan Timur Tengah yang berjumlah sekitar 1,5 juta dalam keadaan bahaya, maka Pemerintah Presiden Gloria Arroyo memutuskan untuk menarik pasukan Filipina dari Irak.

F. HIPOTESA

Dari permasalahan yang ada serta didukung oleh kerangka dasar teori yang diterapkan, maka akan ditarik suatu hipotesa sebagai berikut : kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Presiden Gloria Macapagal Arroyo untuk menarik pasukannya dari Irak dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan yang begitu besar, yaitu tuntutan dari para pekerja Filipina di luar negeri yang berjumlah lebih dari 8 juta orang, kalangan gereja yang mengkhawatirkan keselamatan para pekerja migran Filipina, tuntutan kelompok-kelompok oposisi Filipina, kekhawatiran perselisihan atas kemenangan Arroyo dalam pemilu berubah menjadi protes massal yang menjatuhkan pemerintahan, dan juga dukungan dari House of Representative dan para Senator Filipina, serta sesuai dengan Konstitusi Filipina.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian dimulai dari Pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Penulis berusaha untuk memberikan fokus utama pada kebijaksanaan penarikan pasukan Filipina dari Irak pada masa Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo pada Juli 2004 silam. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi penulis, untuk menulis beberapa data yang berada di luar batasan tersebut untuk lebih memperkuat dan diadikan data pendukung bagi penulis

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan. Adapun data-data yang digali bersumber dari berbagai literatur, baik itu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, publikasi, brosur, koran, majalah, dan media-media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bab I yang menceritakan alasan pemilihan judul, yaitu ketertarikan penulis terhadap fenomena perubahan perkembangan politik dalam negeri negara-negara yang tergabung dalam pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang menyerang Irak, termasuk di dalamnya Filipina. Tujuan penelitian ini yaitu ingin memberikan gambaran yang obyektif tentang kebijakan yang diambil oleh Presiden Gloria Arroyo. Latar Belakang Masalah menjelaskan proses penyerangan Amerika Serikat ke Irak sampai kerjasama militer Amerika Serikat - Filipina dan proses pengiriman pasukan Filipina ke Irak, tetapi kemudian Pemerintah Filipina menarik pasukannya dari Irak. Sehingga muncul sebuah pertanyaan mengapa Pemerintah Filipina (Presiden Gloria Arroyo) menarik pasukannya dari Irak, yang tercantum dalam pokok permasalahan. Kerangka teori untuk membahas pokok permasalahan ini menggunakan teori analisa sistem politik David Easton yaitu input – sistem politik – output. Dari teori tersebut dan diaplikasikan ke dalam permasalahan yang ada, maka menghasilkan hipotesis yaitu kebijakan yang dikeluarkan Presiden Arroyo

dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dari para pekerja Filipina, gereja, kelompok oposisi, kekhawatiran perselisihan atas kemenangan Arroyo dalam pemilu 2004, dan juga dukungan dari House of Representative dan para Senator, serta sesuai dengan Konstitusi Filipina.

Untuk membuktikan hipotesa tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan sejarah politik Filipina dari penjajahan spanyol, Amerika Serikat, Jepang, sampai memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat yang mempengaruhi karakteristik masyarakat Filipina. Penulis juga membahas Konstitusi Filipina menyangkut peranan presiden dalam krisis sandera ini, kemudian akan dijelaskan juga sistem politik Filipina, seperti partai politik, pemilihan umum, dan parlemen. Kemudian, penulis membahas peranan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta peranan gereja dalam politik Filipina yang sudah tertanan sejak penjajahan Spanyol dan organisasi buruh yang merupakan elemen penting di Filipina. Dan proses pergantian kekuasaan dari Joseph Estrada ke Gloria Arroyo, dimulai dari kemenangan Estrada dalam pemilu 1998, proses penggulingan, sampai kemenangan Arroyo dalam pemilu 2004. Pembahasan ini diterangkan dalam bab II.

Untuk membuktikan hipotesa di atas, dalam bab III ini penulis membahas proses penyanderaan Angelo de la Cruz sampai pada proses pembebasan sandera. Dan juga tekanan di dalam negeri Filipina yang menuntut penarikan pasukan Filipina dari Irak untuk pembebasan sandera yang berasal dari para pekerja Filipina, gereja, kelompok oposisi, dan kekhawatiran perselisihan atas kemenangan Gloria Arroyo dalam pemilihan umum 2004 secara lebih lengkap.

Proses pengambilan keputusan di dalam House of Representative, Senat, dan Kabinet akan dibahas dalam bab IV ini. Di dalam House of Representative para anggota dewan baik oposisi maupun pro pemerintah mendaftarkan resolusi yang menuntut Pemerintah Filipina menarik pasukannya dari Irak, sedangkan di dalam Senat mayoritas senator juga menuntut penarikan pasukan Filipina tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan di kabinet, Presiden Arroyo segera melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan sandera, dan akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya dari Irak.

Dalam bab V ini akan dirumuskan kesimpulan yang didapat dari penjelasan dan analisa bab-bab sebelumnya. Untuk mendukung penulisan, maka disertakan lampiran yang relevan dengan karya tulis ini